



LHE AKIP Rendah

SKPD Tidak Tahu atau Tidak Buat Laporan?

SANGGAU-RK. Ketua Komisi D DPRD Sanggau, Konggo Tjintalong Tjondro mengaku heran dengan kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dinilai masih sangat rendah. Itu terbukti dari Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LHE-AKIP) Daerah Kabupaten Sanggau yang jauh dari harapan masyarakat.

Menurut Konggo, persoalan rendahnya nilai LHE AKIP yang dikeluarkan Kementerian Reformasi dan Birokrasi (Kemenpan RB) disebabkan belum semua SKPD memahami sistem pelaporan yang diminta Kemenpan RB.

"Waktu rapat forum SKPD itukan Bupati ada ngomong, dan mempertanyakan kenapa Kabupaten Sanggau memperoleh urutan ke 14 LHE AKIPnya, pelaporannya ini yang mereka (SKPD) ini tidak paham," kata Konggo belum lama ini.

Ketidakhahaman dalam membuat laporan, dikatakan politisi Golkar itulah yang memicu rendahnya penilaian Kemenpan RB terhadap kinerja SKPD di Pemkab Sanggau.

"Kalau menurut saya dimana letak ketidakhumannya, apakah ini perorangan ataukah bukan atau mungkin tidak ada yang dilaporkan, kan begitu," katanya.

Seharusnya, lanjut Konggo, sebagai Kepala Daerah, Bupati memanggil SKPD terkait yang tidak mampu membuat laporan. "Mereka (SKPD) itu harus dipanggil dan dievaluasi siapa domainnya ini, kalau Bappeda panggil mereka," ujarnya.

Kalau memang ada SKPD yang kurang paham terkait bagaimana membuat laporan, mestinya SKPD bersangkutan memperlajarnya.

"Menurut saya kejadian ini memalukan dong. Kita ini Kabupaten tertua lho di Kalbar, berdasarkan laporan BPK kita WTP, masa LHE AKIP kita di posisi buncit, itukan aneh. Kalah kalau dibandingkan Sekadau ataupun Kayong Utara, mereka Kabupaten baru," terangnya.

Apakah rendahnya LHE AKIP bisa dijadikan momentum Bupati meresufle SKPD yang dianggap kurang optimal, Konggo mengaku tak mau mencampuri lebih jauh.

"Itu domainnya Bupati. Bupati tentu punya pertimbangan lain, bisa jadi ini salah satunya, karena Bupati terus terang ngomong kalau cabut sini yang di sana kosong, begitu sebaliknya, padahal di Sanggau ini ada seribu lebih pegawai," bebernya.

Konggo memahami kebingungan Bupati menempatkan seseorang dalam posisi tertentu.

"Itulah tadi saya bilang, kalau dipindahkan ke sana, ke sininya belobang, itu dilemanya. Kemudian ada istilah basah-kering, ini juga yang membuat Bupati bingung, misalnya BPBD dianggap sebagian orang tempat buangan, padahal tidak pernah diotak atik anggarannya. Kalau mau tempat basah, ku letakkan jak di tempat banjir, itu kata Bupati. Memang Bupati marah kemarin dengan bahasa-bahasa seperti itu," tuturnya.

(KIA)